Jurnal of Applied Business and Banking (JABB) Vol 7 No 2 November 2026
E-ISSN 2723-634X P-ISSN 2775-622X
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Integrating the Blue Economy and Village Finance to Enhance Post Harvest Value Added and SDG Achievements

Aranta Prista Dilasari[1*], Irma Indira[2], Imtinan Widhah Kumala[3], Rizal Wahyu Pratama [4], Afiya Puspita Ningrum[5]
[1,2,3,4,5]Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan
E-mail : arantadila8@gmail.com[1], Indirairma99@gmail.com [2], imtinanwidhahkumala@gmail.com [3], rizalwahyupratama763@gmail.com[4], afiyapuspitan@gmail.com[5]

ABSTRACT

Coastal areas possess immense marine resource potential; however, fishing communities continue to face various challenges, including low value-added for catch products, limited market access, weak village-level economic institutions, and suboptimal women's participation in coastal economic development. This study aims to analyze blue economy practices within the post-harvest fisheries value chain, examine the role of village financial management—specifically through the Village Budget (APBDes) and Village-Owned Enterprises (BUMDes)—in supporting coastal economic development, analyze gender relations regarding the distribution of economic benefits, and formulate a gender-responsive model integrating the blue economy, village finance, and the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Mengareh fishing community. The study employs a qualitative approach with a case study design conducted in the villages of Watu Agung, Tanjung Widoro, and Kramat. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, field observations, and document analysis. The research findings indicate that blue economy practices have developed through community-based marine product processing activities—particularly those led by women—yet these efforts still face limitations regarding capital, technology, marketing capacity, and institutional support. The management of village finances and Village-Owned Enterprises (BUMDes) offers strategic opportunities to strengthen post-harvest value chains, enhance economic value, and support the achievement of the SDGs through an inclusive and gender-responsive coastal development model.

Keywords: Blue Economy, Village Finance, SDGs, Fishing Village, Mengareh.

Integrasi Blue Economy dan Keuangan Desa untuk Meningkatkan Nilai Tambah Pascatangkap dan Capaian SDGs

ABSTRAK

Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya laut yang besar; namun, masyarakat nelayan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya nilai tambah produk hasil tangkapan, keterbatasan akses pasar, lemahnya kelembagaan ekonomi desa, serta belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *blue economy* dalam rantai nilai perikanan pascatangkap, mengkaji peran pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pembangunan ekonomi pesisir, menganalisis relasi gender dalam distribusi manfaat ekonomi, serta merumuskan model integrasi *blue economy*, keuangan desa, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang responsif gender di Kampung Nelayan Mengareh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Desa Watu Agung, Tanjung Widoro, dan Kramat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *blue economy* telah berkembang melalui aktivitas pengolahan produk hasil laut berbasis masyarakat, terutama yang dilakukan oleh perempuan, tetapi masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, kapasitas pemasaran, dan dukungan kelembagaan. Pengelolaan keuangan desa dan BUMDes memiliki peluang strategis dalam memperkuat rantai nilai pascatangkap, meningkatkan nilai ekonomi, serta mendukung pencapaian SDGs melalui model pembangunan pesisir yang inklusif dan responsif gender.

Kata kunci: *Blue Economy*; Keuangan Desa; SDGs; Kampung Nelayan; Mengareh.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ruang hidup dan sumber penghidupan yang sangat bergantung pada wilayah pesisir dan laut (Djunarsjah & Putra, 2021),(Setiyowati et al., 2022). Karena itu, pembangunan kelautan tidak cukup hanya menargetkan peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan ekosistem serta keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kerangka *blue economy* menjadi pendekatan strategis karena menekankan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, efisien, rendah limbah, dan menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja melalui inovasi di rantai nilai perikanan dari penangkapan hingga pengolahan dan pemasaran (Badi et al., 2024; Priyono, 2024). Pendekatan ini selaras dengan SDGs, terutama SDG 1, 5, 8, dan 14 (Andaiyani et al., 2024),(Lestari & Suarja, n.d.). Namun, berbagai studi menegaskan bahwa implementasi blue economy tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata (Zakariana, 2025),(Shifa et al., 2023). Tantangan muncul pada tata kelola, kapasitas kelembagaan, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan. Di tingkat desa pesisir, efektivitas program ditentukan oleh perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan melalui APBDes, termasuk dukungan BUMDes/koperasi (Hakim et al., 2019; Mushfiroh et al., 2024) dan (Pasaribu, 2025). Proses ini mencakup penetapan prioritas belanja, skema dukungan usaha, serta kemitraan pemasaran agar nilai tambah benar-benar naik. Tanpa desain program dan penganggaran yang tepat sasaran, nilai tambah ekonomi pesisir dapat tetap rendah dan masyarakat rentan terhadap guncangan musiman.

Kondisi ini relevan dengan Kampung Nelayan Mengareh, Kabupaten Gresik, khususnya Desa Watu Agung, Tanjung Widoro, dan Kramat. Ketiga desa merupakan kawasan pesisir dengan aktivitas perikanan dan pengolahan hasil laut yang cukup hidup (*Interview Kondisi Mengarih dan UKM Desa Kramat*, 2025). Sekitar 70% istri nelayan terlibat mengolah hasil laut menjadi produk layak jual, sehingga aktivitas pascatangkap (pengolahan, pengemasan, dan pemasaran) seharusnya menjadi pintu masuk penguatan nilai tambah dan diversifikasi penghidupan. Namun, kampung nelayan masih menghadapi pendapatan yang bergantung musim/cuaca, akses pasar fluktuatif, keterbatasan inovasi produk, serta lemahnya manajemen risiko pada musim paceklik (*Interview Kondisi Mengarih dan UKM Desa Kramat*, 2025; Zakariana, 2025),(Badi et al., 2024). Karena itu, dukungan program desa untuk mutu, alat produksi, akses pasar, pembiayaan, dan kelembagaan usaha menjadi kunci. Persoalan yang kerap terabaikan adalah dimensi gender. Studi (Gissi et al., 2018; Indrawasih & Ratri, 2022) menunjukkan perempuan berperan besar dalam ekonomi produktif nelayan, namun kontribusinya sering tidak terlihat dalam data, perencanaan, maupun pengambilan keputusan (Nyiawung & Ayilu, 2025),(Indrawasih & Ratri, 2022). Ketidakadilan akses, terbatasnya partisipasi, dan relasi kuasa juga dapat mendorong gerakan sosial perempuan pesisir (Priyono, 2024). Karena itu, pendekatan responsif gender diperlukan agar program desa tepat sasaran dan manfaatnya lebih adil. Jika kebijakan memakai pendekatan “netral”, kontribusi perempuan dalam pengolahan dan pemasaran mudah terabaikan sehingga program desa berisiko tidak adil dan kurang efektif di level lokal.

Implementasi *blue economy* di tingkat lokal, khususnya desa pesisir, berpotensi besar mendorong pencapaian SDGs, terutama SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 14

(Kehidupan Bawah Air) (Hafidh et al., 2024; Nilsson et al., 2018). Kajian *blue economy* di Indonesia berkembang pesat, dari level kebijakan hingga riset sektor spesifik seperti garam rakyat dan ketahanan pangan. Perkembangan ini penting mengingat potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya sumber daya laut (Badi'ah et al., 2024; Mahadiansar et al., 2023; Sutisna, 2025). Namun, di desa pesisir tantangan kampung nelayan sangat kompleks karena isu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling terkait (Galappaththi et al., 2022). Inisiatif Village SDGs diharapkan membantu pemetaan potensi ekonomi pesisir secara lebih efektif (Permatasari et al., 2021). Studi terdahulu menegaskan bahwa pencapaian SDG 14 (konservasi dan keberlanjutan ekosistem laut) membutuhkan integrasi kebijakan dengan pengelolaan keuangan desa (Sutisna, 2025). Sejumlah penelitian juga menunjukkan keterkaitan *blue economy* dan pengelolaan keuangan desa nelayan, tetapi integrasi dengan SDGs serta perspektif gender masih terbatas (Fajriyah, 2024), (Gissi et al., 2018).

Meskipun kajian mengenai blue economy, ekonomi desa, dan SDGs telah berkembang, masih terdapat celah penelitian pada level implementasi desa pesisir. Studi sebelumnya umumnya membahas *blue economy* dari perspektif konservasi sumber daya laut atau pengembangan sektor tertentu, sementara keterkaitan antara rantai nilai pascatangkap, mekanisme penganggaran desa, peran BUMDes, dan distribusi manfaat ekonomi berbasis gender masih belum banyak dikaji secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi research gap dengan menawarkan analisis integratif yang menghubungkan aspek ekonomi, kelembagaan, pembiayaan desa, dan kesetaraan gender dalam satu kerangka pembangunan pesisir.

Penelitian ini bertujuan memetakan praktik *blue economy* dalam rantai nilai perikanan, menilai dukungan tata kelola keuangan desa terhadap kegiatan pascatangkap, menganalisis keterkaitan program desa dengan SDG 1, SDG 5, SDG 8, dan SDG 14, serta merumuskan model integrasi *blue economy* keuangan desa SDGs yang responsif gender. Mainstreaming gender menjadi krusial karena kontribusi perempuan nelayan dalam ekonomi keluarga sering tidak terlihat dalam tata kelola desa (Nash et al., 2020). Karena itu diperlukan pendekatan partisipatif untuk mengungkap relasi kuasa, serta akses dan kontrol perempuan dalam sektor perikanan (Gissi et al., 2018; Nash et al., 2020). Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan tiga ranah: implementasi *blue economy* dalam rantai nilai perikanan, pengelolaan keuangan desa (RPJMDes–APBDes), dan SDGs dengan perspektif gender. Fokusnya menilai apakah keputusan program dan anggaran desa mendukung atau mengabaikan sektor yang dikelola perempuan, terutama aktivitas pascatangkap yang penting bagi ekonomi keluarga nelayan

TINJAUAN PUSTAKA

Blue Economy dalam Pembangunan Ekonomi Pesisir

Konsep *blue economy* berkembang sebagai pendekatan pembangunan yang menempatkan sumber daya laut sebagai modal ekonomi yang harus dikelola secara berkelanjutan (Evans et al., 2023). Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang lebih menekankan eksploitasi sumber daya untuk meningkatkan produksi, *blue economy* menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekosistem laut, efisiensi penggunaan sumber daya, serta peningkatan kesejahteraan

masyarakat pesisir (Penca et al., 2021). Pendekatan ini melihat laut tidak hanya sebagai sumber bahan baku, tetapi sebagai ruang ekonomi yang dapat menghasilkan nilai tambah melalui inovasi, diversifikasi usaha, dan penguatan rantai nilai. Dalam konteks masyarakat pesisir, implementasi *blue economy* tidak hanya berkaitan dengan sektor penangkapan ikan, tetapi juga mencakup aktivitas pascatangkap seperti pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran produk hasil laut (Mahmud et al., 2026).

Studi mengenai pembangunan ekonomi biru menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat pesisir memperoleh manfaat dari ekonomi berbasis laut dipengaruhi oleh akses terhadap pasar, pembiayaan, teknologi, kapasitas lokal, serta dukungan kelembagaan dan tata kelola yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara lebih setara (Evans et al., 2023; Gorain et al., 2026; Hidayati & de Vries, 2025). Ketersediaan sumber daya laut yang besar dengan demikian tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, karena distribusi manfaat ekonomi dapat berlangsung secara tidak merata apabila masyarakat lokal mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya, pasar, modal, dan proses pengambilan keputusan (Bennett et al., 2021; Hidayati & de Vries, 2025). Dalam perspektif pembangunan desa pesisir, kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendekatan ekonomi biru berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat lokal tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai seseorang yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan pengembangan kegiatan ekonomi (Evans et al., 2023). Pengembangan ekonomi biru pada tingkat desa karena itu memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, kelompok masyarakat, pelaku usaha, serta institusi pendukung untuk membangun tata kelola yang inklusif dan memperkuat posisi ekonomi produsen lokal (Hidayati & de Vries, 2025). Kajian pada komunitas pesisir dan perikanan menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya laut sangat bergantung pada keterhubungan antara sumber daya lokal, kapasitas masyarakat, kelembagaan, akses pembiayaan dan pasar, inovasi dan teknologi, serta koordinasi antarpemangku kepentingan (Gorain et al., 2026).

Nilai Tambah Pascatangkap dan Rantai Nilai Perikanan

Nilai tambah pascatangkap merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat nelayan karena manfaat ekonomi dari sumber daya perikanan tidak hanya ditentukan oleh volume tangkapan, tetapi juga oleh posisi produsen dalam keseluruhan rantai nilai. Dalam berbagai perikanan skala kecil, nelayan sebagai produsen primer sering memperoleh proporsi yang relatif kecil dari nilai akhir produk, sedangkan sebagian nilai ekonomi terakumulasi pada faktor hilir seperti pedagang, pengumpul, pengolah, eksportir, dan pengecer (Purcell et al., 2017; Roberts et al., 2022). Ketimpangan tersebut berkaitan dengan keterbatasan informasi pasar, ketergantungan terhadap perantara, akses pembiayaan, dan lemahnya posisi tawar nelayan dalam menentukan harga serta saluran pemasaran (Roberts et al., 2022). Pendekatan rantai nilai (*value chain approach*) karena itu menempatkan peningkatan nilai produk sebagai proses yang berlangsung melalui berbagai tahapan, mulai dari produksi dan penanganan hasil, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran kepada konsumen (Mahmud et al.,

2026). Aktivitas pascatangkap menjadi strategis karena pengolahan, peningkatan kualitas, diversifikasi produk, pengembangan merek, dan perluasan pasar dapat meningkatkan nilai ekonomi produk sekaligus membuka peluang pendapatan dan kegiatan usaha baru bagi masyarakat lokal (Hidayati & de Vries, 2025; Purcell et al., 2017). Dalam perspektif ekonomi biru berbasis masyarakat pesisir, pengembangan industri pengolahan lokal, akses terhadap pasar dan infrastruktur, serta penguatan kelompok atau usaha kolektif dapat memperbaiki posisi negosiasi produsen dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan nilai tambah di tingkat lokal (Hidayati & de Vries, 2025). Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak cukup dilakukan melalui p*value-chain upgrading* melalui inovasi produk, pengolahan, diferensiasi, penguatan organisasi, dan peningkatan akses pasar sehingga produk perikanan memiliki daya saing dan nilai ekonomi yang lebih tinggi (Purcell et al., 2017).

Keuangan Desa dan Kelembagaan Ekonomi Lokal

Pembangunan ekonomi pesisir pada tingkat desa membutuhkan dukungan kelembagaan dan instrumen pembiayaan yang mampu menghubungkan potensi sumber daya lokal dengan agenda pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki posisi strategis sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran desa, sedangkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan prioritas pembangunan desa (Yusuf & Khoirunurrofik, 2022). Dana yang dikelola pemerintah desa dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dapat diarahkan untuk penguatan kapasitas masyarakat, kegiatan ekonomi produktif, pengembangan kewirausahaan lokal, dan pemberdayaan masyarakat (Ardiputra et al., 2025). Efektivitas pemanfaatan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah de

Dalam konteks pengembangan ekonomi pesisir, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi salah satu kelembagaan ekonomi lokal yang menghubungkan potensi sumber daya desa dengan kegiatan usaha dan akses pasar. Studi mengenai masyarakat pesisir di Madura menunjukkan bahwa BUMDes, kelompok produsen, dan organisasi masyarakat lokal dapat berperan sebagai kelembagaan perantara antara masyarakat, pemerintah, dan kegiatan ekonomi desa, termasuk dalam pengembangan pariwisata dan pemanfaatan sumber daya pesisir (Hidayati & de Vries, 2025). Pada konteks yang lebih luas, BUMDes juga dapat digunakan untuk memperkuat kewirausahaan desa dan mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan potensi sumber daya lokal; namun keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, kemampuan manajerial, partisipasi masyarakat, akses terhadap modal, dan dukungan pemerintah (Kania et al., 2021; Kurnianto & Iswanu, 2021). Karena itu, pembentukan BUMDes semata tidak otomatis menghasilkan penguatan eko

Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam pembangunan ekonomi biru karena masyarakat nelayan dan pelaku usaha pesisir masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, modal, asuransi, infrastruktur, dan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perikanan (Gorain et al., 2026). Keterbatasan pembiayaan dapat menghambat investasi pada teknologi yang lebih produktif dan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, peningkatan nilai tambah, serta diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir. Sebaliknya, instrumen pembiayaan yang dirancang sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir dapat membantu meningkatkan

stabilitas pendapatan, memperluas akses pasar, mendukung diversifikasi usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat (Gorain et al., 2026). Dengan demikian, pengembangan ekonomi biru berbasis desa membutuhkan integrasi antara keuangan desa, kelembagaan ekonomi lokal, kapasitas tata kelola, akses pembiayaan, dan pengembangan usaha yang berorientasi pada poten

Blue Economy, Gender, dan Pencapaian SDGs

Pembangunan ekonomi pesisir tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial, khususnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi. Dalam komunitas nelayan, perempuan memiliki peran penting dalam pengolahan hasil laut, pemasaran produk, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Namun, kontribusi tersebut sering kali belum terlihat dalam perencanaan pembangunan, penganggaran desa, maupun pengambilan keputusan ekonomi. Pendekatan ekonomi biru yang berkelanjutan perlu memasukkan perspektif gender karena keberhasilan pembangunan pesisir tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh distribusi manfaat pembangunan secara adil. Kajian mengenai tata kelola laut berkelanjutan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan menjadi faktor penting dalam membangun sistem ekonomi pesisir yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi *blue economy* dengan Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki hubungan erat, khususnya pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 14 (Ekosistem Laut). Pengembangan ekonomi pesisir yang berbasis nilai tambah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat peran perempuan, sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis integrasi *blue economy* dan tata kelola keuangan desa dalam meningkatkan nilai tambah pascatangkap serta mendukung capaian SDGs di Kampung Nelayan Mengareh, Kabupaten Gresik. Lokasi penelitian meliputi tiga desa pesisir, yaitu Desa Watu Agung, Tanjung Widoro, dan Kramat. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai praktik ekonomi pesisir, rantai nilai hasil laut, peran kelembagaan desa, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat nelayan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan observasi lapangan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam ekosistem ekonomi pesisir, meliputi pemerintah desa, pengelola BUMDes/koperasi, kelompok nelayan, pengepul, pelaku UMKM pengolahan hasil laut, serta perempuan pengolah hasil laut. Apabila diperlukan, pemilihan informan dikembangkan menggunakan teknik *snowball sampling*. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa APBDes, program pembangunan desa, dokumen BUMDes/koperasi, data UMKM, dan dokumen kelompok nelayan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemetaan awal kondisi sosial ekonomi masyarakat, identifikasi rantai nilai pascatangkap, penggalian pengalaman pemangku kepentingan melalui wawancara dan FGD, serta observasi terhadap

aktivitas pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hasil laut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik melalui proses transkripsi, reduksi data, pengkodean (*coding*), kategorisasi tema, dan interpretasi hubungan antara praktik *blue economy*, dukungan keuangan desa, peran perempuan, serta capaian SDGs. Selain analisis tematik, penelitian ini menggunakan pemetaan rantai nilai (*value chain mapping*) untuk mengidentifikasi alur ekonomi mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran hasil laut. Analisis dokumen dilakukan untuk melihat keterkaitan program dan anggaran desa dengan penguatan ekonomi pesisir serta kontribusinya terhadap SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 14 (Ekosistem Laut). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi dari pemerintah desa, kelompok nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat pesisir, serta membandingkan hasil wawancara, FGD, observasi, dan dokumen. Selain itu, dilakukan *member checking* kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan kondisi empiris di lapangan.

Untuk meningkatkan transparansi metodologis, penelitian ini melibatkan informan yang mewakili setiap komponen rantai nilai dan tata kelola ekonomi desa, yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes/koperasi, kelompok nelayan, pengepul, pelaku UMKM pengolahan hasil laut, dan perempuan pengolah hasil laut. Proses analisis dilakukan secara bertahap melalui open coding terhadap hasil transkripsi wawancara, pengelompokan kode menjadi tema utama, kemudian interpretasi hubungan antar tema berdasarkan kerangka blue economy, keuangan desa, gender, dan SDGs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Blue Economy pada Rantai Nilai Perikanan Pascatangkap Berbasis Masyarakat di Kampung Nelayan Mengareh

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa praktik *blue economy* pada masyarakat pesisir Kampung Nelayan Mengareh telah berlangsung melalui berbagai aktivitas ekonomi berbasis sumber daya laut, mulai dari kegiatan penangkapan ikan, distribusi hasil tangkapan, hingga pengolahan produk hasil laut. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai nilai perikanan masih didominasi oleh aktivitas produksi primer, yaitu penangkapan dan penjualan hasil laut dalam bentuk bahan mentah. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah ekonomi dari sumber daya laut belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat nelayan sebagai subjek utama produksi. Pada tahap produksi, nelayan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pengepul sebagai saluran pemasaran utama hasil tangkapan. Hubungan tersebut memberikan kemudahan bagi nelayan karena hasil tangkapan dapat segera dipasarkan setelah aktivitas melaut, tetapi pada sisi lain menyebabkan posisi tawar nelayan dalam menentukan harga dan pengembangan pasar masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi pesisir masih berada pada pola ekonomi konvensional yang berorientasi pada penjualan hasil tangkapan, belum sepenuhnya berkembang menuju ekonomi biru yang menekankan peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok nelayan, diketahui bahwa hasil tangkapan nelayan sebagian besar langsung dijual kepada pengepul karena belum terdapat sistem pengolahan dan pemasaran alternatif yang mampu memperkuat posisi ekonomi nelayan. Informan menjelaskan:

"Kalau hasil tangkapan biasanya langsung dijual ke pengepul. Nelayan memang sudah terbiasa seperti itu karena lebih mudah, setelah pulang melaut hasil langsung terjual." (Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rantai nilai perikanan di Kampung Nelayan Mengareh masih memiliki keterbatasan pada aspek hilirisasi. Nelayan memiliki akses terhadap sumber daya laut, tetapi belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengembangkan proses lanjutan seperti pengolahan produk, pengemasan, dan pemasaran. Dalam perspektif *blue economy*, kondisi tersebut menjadi tantangan karena keberhasilan ekonomi berbasis laut tidak hanya ditentukan oleh kemampuan eksploitasi sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar melalui inovasi dan diversifikasi produk. Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa proses penciptaan nilai tambah mulai berkembang melalui aktivitas pascatangkap yang banyak dilakukan oleh perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM pengolahan hasil laut, diketahui bahwa perempuan memiliki kontribusi penting dalam mengolah hasil tangkapan menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi, seperti kerupuk ikan, kerupuk berbahan ikan payus, dan terasi. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan subjek penting dalam rantai nilai perikanan, khususnya pada tahap pengolahan dan pengembangan produk. Salah satu informan pelaku UMKM menjelaskan:

"Usaha yang dilakukan berupa produksi kerupuk menggunakan ikan payus dan ikan laut lainnya. Selain itu juga membuat terasi dari hasil laut yang tersedia di wilayah sini." (Wawancara dengan UMKM Pengolah Hasil Laut, 2026)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat pesisir telah memiliki kemampuan lokal dalam melakukan transformasi ekonomi terhadap sumber daya laut. Produk olahan yang dihasilkan menunjukkan adanya proses perubahan dari komoditas primer menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Namun, hasil penelitian juga menemukan bahwa pengembangan usaha tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan keterbatasan modal, pemasaran, teknologi produksi, dan akses terhadap pasar yang lebih luas. Informan UMKM menjelaskan bahwa pengembangan usaha masih dilakukan dalam skala terbatas karena keterbatasan dukungan usaha.

"Kendalanya lebih kepada modal dan pemasaran. Produk sudah dibuat, tetapi pemasaran masih melalui orang-orang yang dikenal sehingga belum bisa berkembang lebih luas." (Wawancara dengan Pelaku UMKM Pengolahan Hasil Laut, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pengembangan ekonomi biru di Kampung Nelayan Mengareh bukan terletak pada ketiadaan potensi sumber daya maupun kemampuan masyarakat dalam mengolah hasil laut, tetapi pada belum terbentuknya sistem pendukung yang mampu memperkuat rantai nilai. Dengan demikian,

pengembangan *blue economy* membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi antara produksi, pengolahan, pembiayaan, pemasaran, dan kelembagaan desa. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik *blue economy* di Kampung Nelayan Mengareh telah memiliki fondasi melalui aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya laut dan mengembangkan produk olahan hasil laut. Namun, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung capaian SDGs, diperlukan penguatan kelembagaan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas akses pasar, serta memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil bagi seluruh subjek dalam rantai nilai perikanan.

Pengelolaan APBDes dan BUMDes dalam Mendukung Capaian SDGs melalui Penguatan Ekonomi Pesisir

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui kebijakan pembangunan desa, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara potensi ekonomi laut dengan perencanaan pembangunan desa di Kampung Nelayan Mengareh belum sepenuhnya berjalan optimal. Pemerintah desa telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada masyarakat nelayan dan pelaku UMKM, tetapi dukungan tersebut masih lebih banyak bersifat fasilitatif dan belum sepenuhnya diarahkan pada strategi pengembangan ekonomi berbasis *blue economy*.

Dalam konteks pembangunan desa, APBDes memiliki fungsi strategis sebagai instrumen kebijakan untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya desa sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Desa pesisir memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dengan desa agraris karena sebagian besar masyarakat bergantung pada sumber daya laut dan aktivitas pascatangkap. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan nelayan, pengembangan UMKM hasil laut, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa, diketahui bahwa dukungan terhadap masyarakat nelayan telah dilakukan melalui fasilitasi kelompok nelayan, pendataan masyarakat pesisir, serta penghubung program pemerintah daerah. Namun, program yang secara khusus mengintegrasikan potensi hasil laut dengan pengembangan ekonomi desa masih belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan desa.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan pemerintah desa:

“Selama ini desa mendukung kelompok nelayan yang ada, terutama ketika ada program dari pemerintah daerah. Namun untuk pengembangan potensi laut sebagai unit ekonomi desa masih perlu dikembangkan.” (Wawancara dengan Kepala Desa, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki kesadaran terhadap keberadaan sektor perikanan sebagai basis ekonomi masyarakat, tetapi belum

sepenuhnya mengembangkan strategi kelembagaan yang menjadikan sektor kelautan sebagai prioritas pembangunan ekonomi desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya yang dimiliki desa dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan. Selain aspek APBDes, penelitian ini juga menemukan bahwa BUMDes memiliki peran penting dalam mendukung integrasi ekonomi desa dengan potensi lokal. BUMDes secara konseptual tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha desa, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui BUMDes, pemerintah desa memiliki peluang untuk membangun sistem ekonomi yang menghubungkan pelaku produksi lokal dengan pasar yang lebih luas.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes di wilayah penelitian masih memiliki variasi. Pada beberapa desa, BUMDes belum memiliki program yang secara khusus mendukung sektor perikanan dan pengolahan hasil laut. Fungsi BUMDes masih lebih banyak diarahkan pada kegiatan ekonomi umum dan belum menjadi lembaga penggerak rantai nilai pascatangkap.

Informan pemerintah desa menjelaskan:

“BUMDes sudah ada, tetapi untuk usaha yang khusus menangani hasil laut atau mendukung nelayan belum berjalan secara khusus.” (Wawancara dengan Kepala Desa, 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya ketersediaan kelembagaan, tetapi kemampuan BUMDes dalam mengidentifikasi peluang ekonomi berdasarkan karakteristik wilayah. Dalam konteks Kampung Nelayan Mengareh, BUMDes memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai lembaga agregator ekonomi pesisir yang berfungsi menghubungkan nelayan, pelaku UMKM, pasar, dan lembaga pembiayaan. Pada wilayah tertentu, penelitian menemukan adanya praktik yang lebih berkembang ketika BUMDes mulai diarahkan untuk membantu pemasaran produk masyarakat. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan desa dapat memberikan dampak positif apabila memiliki orientasi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes dan BUMDes memiliki hubungan erat dengan keberhasilan implementasi *blue economy*. Keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi ekonomi masyarakat pesisir. Apabila diarahkan secara tepat, APBDes dan BUMDes dapat menjadi penggerak peningkatan nilai tambah pascatangkap, memperkuat ekonomi perempuan pesisir, serta mendukung pencapaian SDGs melalui pengurangan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, dan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Relasi Gender dalam Ekonomi Pesisir: Peran Perempuan dalam Rantai Nilai Pascatangkap dan Distribusi Manfaat Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa perempuan memiliki peran penting dalam keberlangsungan ekonomi rumah tangga nelayan, khususnya pada aktivitas pascatangkap. Perempuan tidak hanya berperan dalam aktivitas domestik, tetapi juga menjadi subjek ekonomi yang terlibat dalam proses

pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hasil laut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam rantai nilai perikanan menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan sumber daya laut memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dalam struktur ekonomi masyarakat nelayan, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan menunjukkan pola yang relatif berbeda. Laki-laki lebih dominan pada aktivitas penangkapan ikan karena membutuhkan kemampuan fisik, pengalaman melaut, dan akses terhadap sarana produksi. Sementara itu, perempuan lebih banyak terlibat pada tahap setelah hasil laut diperoleh, terutama dalam pengolahan produk menjadi komoditas yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Hasil wawancara dengan pelaku UMKM perempuan menunjukkan bahwa aktivitas pengolahan hasil laut telah menjadi bagian penting dari strategi ekonomi keluarga nelayan.

Informan menyampaikan:

"Setelah bahan baku tersedia, biasanya dilakukan pengolahan menjadi kerupuk atau produk lain. Pekerjaan ini banyak dilakukan oleh ibu-ibu karena memang sudah menjadi keterampilan yang dilakukan sehari-hari." (Wawancara dengan Pelaku UMKM Pengolahan Hasil Laut, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi nyata dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Namun, penelitian juga menemukan bahwa besarnya kontribusi perempuan belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Permasalahan utama yang dihadapi perempuan pelaku usaha meliputi keterbatasan modal, akses teknologi, kemampuan pemasaran, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan usaha. Sebagian besar perempuan masih mengembangkan usaha dalam skala rumah tangga sehingga kapasitas produksi dan jangkauan pemasaran masih terbatas.

Salah satu informan menjelaskan:

"Produksi sebenarnya bisa ditingkatkan, tetapi kendalanya modal dan pemasaran. Selama ini pemasaran masih melalui kenalan dan pelanggan tetap." (Wawancara dengan Pelaku UMKM Perempuan, 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kontribusi perempuan dalam penciptaan nilai tambah dengan akses terhadap sumber daya pendukung usaha. Dalam perspektif pembangunan responsif gender, keterlibatan perempuan tidak cukup hanya dilihat dari partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan aspek akses, kontrol, dan distribusi manfaat. Oleh karena itu, pengembangan *blue economy* di Kampung Nelayan Mengareh perlu memasukkan dimensi gender sebagai bagian integral dari strategi pembangunan. Penguatan kapasitas perempuan melalui akses pembiayaan, pelatihan usaha, dukungan teknologi, dan keterlibatan dalam kelembagaan ekonomi desa menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi pesisir dapat dirasakan secara lebih merata. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya kelompok penerima manfaat pembangunan, tetapi merupakan subjek utama dalam rantai nilai perikanan. Penguatan posisi perempuan dalam ekonomi pesisir akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDG 5 tentang

kesetaraan gender sekaligus memperkuat SDG 8 melalui penciptaan peluang usaha dan pekerjaan berbasis masyarakat lokal.

Hambatan, Peluang, dan Model Integrasi Blue Economy Keuangan Desa SDGs Responsif Gender di Kampung Nelayan Mengareh

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekonomi pesisir, dapat diketahui bahwa pengembangan *blue economy* di Kampung Nelayan Mengareh memiliki potensi yang besar, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kelembagaan. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan produksi masyarakat, tetapi juga mencakup aspek pemasaran, pembiayaan, kelembagaan desa, serta keterlibatan kelompok perempuan. Hambatan pertama ditemukan pada aspek rantai nilai pascatangkap. Sebagian besar masyarakat masih menjual hasil laut dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonomi yang diperoleh masih relatif rendah. Keterbatasan teknologi pengolahan dan akses pasar menyebabkan pelaku usaha belum mampu meningkatkan skala produksi.

Hambatan kedua berkaitan dengan kapasitas kelembagaan ekonomi desa. Meskipun pemerintah desa dan BUMDes telah tersedia, integrasi antara lembaga desa dengan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir masih perlu diperkuat. BUMDes belum sepenuhnya berfungsi sebagai lembaga yang menghubungkan produksi masyarakat dengan pasar dan pembiayaan. Hambatan ketiga berkaitan dengan aspek gender. Perempuan telah berperan besar dalam aktivitas pascatangkap, tetapi masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian, penelitian juga menemukan berbagai peluang pengembangan ekonomi biru di Kampung Nelayan Mengareh. Pertama, masyarakat memiliki sumber daya laut yang potensial untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Kedua, terdapat kelompok perempuan dan UMKM yang telah memiliki pengalaman dalam pengolahan hasil laut. Ketiga, pemerintah desa memiliki instrumen kebijakan melalui APBDes dan BUMDes yang dapat diarahkan untuk memperkuat ekonomi pesisir.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan model integrasi *blue economy*–keuangan desa SDGs yang responsif gender melalui tiga strategi utama. Pertama, penguatan rantai nilai pascatangkap melalui peningkatan kapasitas produksi, inovasi produk, pengemasan, sertifikasi, dan pemasaran. Strategi ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan baku, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari proses hilirisasi. Kedua, penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui optimalisasi APBDes dan BUMDes sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal. BUMDes perlu diarahkan menjadi pusat penguatan ekonomi pesisir yang mampu menghubungkan masyarakat dengan pasar, teknologi, dan pembiayaan. Ketiga, pembangunan ekonomi pesisir berbasis kesetaraan gender melalui peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Perempuan perlu ditempatkan sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan model tersebut, integrasi *blue economy* dan keuangan desa tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian SDGs secara lebih luas. Penguatan nilai tambah pascatangkap berkontribusi terhadap SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi),

pemberdayaan perempuan mendukung SDG 5 (Kesetaraan Gender), sedangkan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan mendukung SDG 14 (Ekosistem Laut). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi pesisir di Kampung Nelayan Mengareh membutuhkan pendekatan integratif yang menghubungkan sumber daya laut, kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, dan prinsip keberlanjutan. Integrasi tersebut menjadi fondasi penting untuk mewujudkan model *blue economy* berbasis desa yang inklusif, responsif gender, dan berorientasi pada pencapaian SDGs.

Secara analitis, temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama Kampung Nelayan Mengareh bukan terletak pada keterbatasan sumber daya laut, melainkan pada missing linkage antara produksi primer, hilirisasi, pembiayaan, dan akses pasar. Keberadaan perempuan dalam aktivitas pascatangkap membuktikan bahwa peningkatan nilai tambah telah berlangsung secara lokal, tetapi belum didukung oleh sistem kelembagaan yang mampu memperbesar skala usaha. Dengan demikian, intervensi pembangunan tidak cukup hanya menyediakan bantuan produksi, tetapi perlu membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan kapasitas masyarakat, BUMDes, penganggaran desa, teknologi, dan pasar.

Tabel 1. Model Integrasi Blue Economy–Keuangan Desa–SDGs Responsif Gender dalam Penguatan Nilai Tambah Pascatangkap

Komponen Input	Mekanisme Integrasi	Output SDGs
Potensi sumber daya laut dan kapasitas nelayan	Penguatan rantai nilai pascatangkap melalui inovasi produk, teknologi, dan pemasaran	SDG 1 dan SDG 8
APBDes + BUMDes	Pembiayaan, agregasi usaha, akses pasar, dan penguatan kelembagaan	SDG 8
Perempuan pengolah hasil laut	Akses modal, pelatihan, dan keterlibatan pengambilan keputusan	SDG 5
Konservasi dan tata kelola pesisir	Pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan	SDG 14

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik ekonomi biru di Kampung Nelayan Mengareh telah berkembang melalui pemanfaatan sumber daya laut dalam aktivitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut, tetapi implementasinya masih belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang optimal bagi masyarakat nelayan. Rantai nilai perikanan masih didominasi oleh penjualan hasil tangkapan dalam bentuk bahan mentah melalui pengepul sehingga posisi tawar nelayan masih relatif rendah. Meskipun demikian, aktivitas pascatangkap yang banyak dilakukan oleh perempuan menunjukkan adanya potensi besar dalam menciptakan nilai tambah melalui pengolahan produk seperti kerupuk ikan, kerupuk berbahan ikan payus, dan terasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam ekonomi pesisir, bukan

hanya sebagai pendukung rumah tangga nelayan, tetapi sebagai subjek utama dalam proses transformasi ekonomi berbasis sumber daya laut. Pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Badan Usaha Milik Desa memiliki posisi penting dalam memperkuat implementasi ekonomi biru, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara potensi ekonomi laut dengan kebijakan pembangunan desa belum sepenuhnya optimal. Pemerintah desa telah memberikan dukungan terhadap kelompok nelayan dan pelaku usaha, namun program ekonomi berbasis hasil laut belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa perlu diarahkan tidak hanya sebagai lembaga usaha desa, tetapi sebagai penghubung antara masyarakat produsen, pasar, pembiayaan, dan inovasi usaha.

Relasi gender menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi pesisir karena perempuan telah memberikan kontribusi besar pada aktivitas pascatangkap, tetapi masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, pemasaran, dan pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, model integrasi ekonomi biru, keuangan desa, dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditawarkan dalam penelitian ini perlu menempatkan perempuan sebagai subjek strategis melalui penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan keterlibatan dalam kelembagaan ekonomi desa. Dengan demikian, pengembangan ekonomi pesisir di Kampung Nelayan Mengareh membutuhkan pendekatan integratif yang menghubungkan sumber daya laut, rantai nilai pascatangkap, tata kelola keuangan desa, kelembagaan ekonomi lokal, dan perspektif gender. Model tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat, memperkuat keberlanjutan sumber daya laut, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Andaiyani, S., Marwa, T., & Nurhaliza, S. (2024). *Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan : Studi Empiris Provinsi Kepulauan di Indonesia*. *13*(1), 69–85.

Ardiputra, S., Milyan, M., Akhmad, Z., Sulthan, M., & Ardiputra, M. A. (2025). Optimizing budget policy in village fund allocation (ADD): A governance and public administration perspective on rural development. *Frontiers in Political Science*, *7*, 1581806. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1581806

Badi'ah, R., Wiratama, D., Pratama, M. A. N., Kumala, I. W., & Indira, I. (2024). Berbagi Keberkahan: Pendampingan Usaha "Es Bahagia" sebagai Wujud Kepedulian Sosial di Bulan Ramadhan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, *8*(2), 1627–1638.

Badi, R., Wiratama, D., Indira, I., & Rahma, A. A. (2024). *The Role of Blue Technology as a Driver in Realizing Sustainable Production of People ' s Salt in East Java Province*. *9*(2), 1500–1515.

Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, *125*, 104387. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387

Djunarsjah, E., & Putra, A. P. (2021). The concept of an archipelagic Province in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *777*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/777/1/012040

Evans, L. S., Buchan, P. M., Fortnam, M., Honig, M., & Heaps, L. (2023). Putting coastal communities at the center of a sustainable blue economy: A review of risks,

opportunities, and strategies. *Frontiers in Political Science*, *4*, 1032204. https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1032204

Fajriyah, N. (2024). Community-Based Blue Economy Development in Mangrove Ecosystems (Case Study in the Segara Anakan Lagoon, Cilacap Regency). *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, *1314*(1), 12055. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1314/1/012055

Galappaththi, M., Armitage, D., & Collins, A. M. (2022). Women's Experiences in Influencing and Shaping Small-scale Fisheries Governance. *Fish and Fisheries*, *23*(5), 1099–1120. https://doi.org/10.1111/faf.12672

Gissi, E., Portman, M. E., & Hornidge, A.-K. (2018). Un-Gendering the Ocean: Why Women Matter in Ocean Governance for Sustainability. *Marine Policy*, *94*, 215–219. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.05.020

Gorain, S., Dutta, S., Thapa, A., Seenivasan, P., & Suresh, A. (2026). Global assessment of financial mechanisms supporting blue livelihoods and sustainable development in coastal and marine fishing communities. *Discover Oceans*, *3*, 30. https://doi.org/10.1007/s44289-026-00140-6

Hafidh, H. A., Ayoub, Z., Soud, N. S., & Sharif, M. (2024). Innovative Financial Models for Sustainable Investment in Zanzibar's Blue Economy: Challenges and Opportunities. *Asian Journal of Economics Business and Accounting*, *24*(12), 12–37. https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i121589

Hakim, M. A. R., Trisnandari, L., & Ikaputra. (2019). Karakteristik dan Pola Kampung Nelayan. *Tesa Arsitektur*, *17*, 115–126.

Hidayati, D. R., & de Vries, W. T. (2025). Connecting the dots between blue economic development and coastal community development using a seaweed case study in Madura, Indonesia. *Discover Sustainability*, *6*(1), 1346. https://doi.org/10.1007/s43621-025-02264-9

Indrawasih, R., & Ratri, A. M. (2022). *aph for detection influence actor Strategi Peningkatan Pendapatan Keluarga Nelayan Melalui Peran Perempuan: International Journal of Advances in Intelligent Informatics Studi Kasus pada Komunitas Nelayan Demak, Jawa Tengah An extended approach of weight c*. *8*(1).

Interview Kondisi Mengarih Dan UKM Desa Kramat (2025).

Kania, I., Anggadwita, G., & Alamanda, D. T. (2021). A new approach to stimulate rural entrepreneurship through village-owned enterprises in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, *15*(3), 432–450. https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137

Kurnianto, S., & Iswanu, B. I. (2021). Governance and performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, *6*(2). https://doi.org/10.20473/jraba.v6i2.35534

Lestari, S., & Suarja, Z. A. (n.d.). Blue Ekonomi : Dampak Perencanaan Anggaran Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan *Blue Economy : The Impact of Budget Planning on Sustainable Economic Development*. *9*(1), 27–38.

Mahadiansar, M., Alfiandri, A., & Marliani, M. (2023). PESTEL Analysis of Blue Economy Development Policy in Indonesia. *Bio Web of Conferences*, *70*, 5005. https://doi.org/10.1051/bioconf/20237005005

Mahmud, A., Parikh, P., Ahmed, J. U., Alam, M. J., Mostafizur, R. M., Shijun, D., Begum, I. A., Akhtar, F., Siddika, S., & McKenzie, A. M. (2026). Fish value chain analysis: a scoping review. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, *10*, 1673453. https://doi.org/10.3389/fsufs.2026.1673453

Mushfiroh, L., Lestari, V. D., Nurrochmah, A., & Pandin, M. Y. R. (2024). *Pengaruh Blue Ecconomy terhadap Pengelolaan Keuangan di Sektor Kelautan dan Perikanan pada Kampung Nelayan Morokrembangan*.

Nash, K. L., Blythe, J., Cvitanovic, C., Fulton, E. A., Halpern, B. S., Milner-Gulland, E. J., Addison, P., Pecl, G. T., Watson, R., & Blanchard, J. L. (2020). To Achieve a Sustainable Blue Future, Progress Assessments Must Include Interdependencies Between the Sustainable Development Goals. *One Earth*, *2*(2), 161–173. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.01.008

Nilsson, M., Chisholm, E., Griggs, D., Howden-Chapman, P., McCollum, D., Messerli, P., Neumann, B., Stevance, A., Visbeck, M., & Stafford-Smith, M. (2018). Mapping Interactions Between the Sustainable Development Goals: Lessons Learned and Ways Forward. *Sustainability Science*, *13*(6), 1489–1503. https://doi.org/10.1007/s11625-018-0604-z

Nyiawung, R. A., & Ayilu, R. K. (2025). Social Innovation in Small-Scale Blue Food Systems: A Case Study of Oyster Harvesters in the Gambia, West Africa. *Environmental Policy and Governance*. https://doi.org/10.1002/eet.70024

Pasaribu, I. F. (2025). Mainstreaming Gender in the Blue Economy in Indonesia: Literature Review From an Ecological and Maritime Feminism Perspective. *Journal of Urban Sociology*, 99–107. https://doi.org/10.30742/jus.v8i2.4411

Penca, J., Said, A., Cavallé, M., Pita, C., & Libralato, S. (2021). Sustainable small-scale fisheries markets in the Mediterranean: weaknesses and opportunities. *Maritime Studies*, *20*, 141–155. https://doi.org/10.1007/s40152-021-00222-5

Permatasari, P., Ilman, A., Tilt, C., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals. *Sustainability*, *13*(21), 12294. https://doi.org/10.3390/su132112294

Priyono, V. R. P. (2024). Implementasi Blue Economy Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals Ke-14 Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional. In *universitas islam indonesia*. universitas islam indonesia.

Purcell, S. W., Crona, B. I., Lalavanua, W., & Eriksson, H. (2017). Distribution of economic returns in small-scale fisheries for international markets: A value-chain analysis. *Marine Policy*, *86*, 9–16. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.09.001

Roberts, N., Mengge, B., Utina, M. R., Muhatar, F., Anugerah, Icwardanhi, A., Zulkifli, R. M., & Humphries, A. T. (2022). Patron-client relationships shape value chains in an Indonesian island-based fisheries system. *Marine Policy*, *143*, 105142. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105142

Setiyowati, H., Nugroho, M., & Halik, A. (2022). Developing a Blue Economy in Depok West Java, Indonesia: Opportunities and Challenges of Neon Tetra Fish Cultivation. *Sustainability*, *14*(20), 13028. https://doi.org/10.3390/su142013028

Shifa, M., Nasir, M. A., Ariani, D., & Suhendra, N. (2023). Analysis of the Coastal Economic Potential With Based on the Blue Economy Concept in Realizing Village SDGs. *J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 413–430. https://doi.org/10.32505/j-ebis.v8i2.5945

Sutisna, N. (2025). Legal Frameworks for Sustainable Blue Economy: Harmonizing Maritime Resource Governance and Environmental Protection. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, *1566*(1), 12005. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1566/1/012005

Yusuf, M., & Khoirunurrofik. (2022). Hubungan Dana Desa dengan pembangunan

ekonomi desa: Studi tingkat desa di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, *14*, 493–504. https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.493-504

Zakariana, Y. (2025). *Tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi oleh kampung nelayan*.